

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah**

###### **a. Sejarah Provinsi Jawa Tengah**

Sejarah Jawa Tengah sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Jawa Tengah merupakan wilayah di Indonesia yang sudah melewati berbagai macam kekuasaan. Dimulai dari berdirinya kerajaan Budha Kalingga pada abad ke VII, sekitar tahun 674 Masehi yang terletak di Kabupaten Jepara (saat ini), yang dipimpin oleh Ratu Sima. Setelah itu pada tahun 732 Masehi kerajaan Hindu pertama di Jawa Tengah berdiri tepatnya di Medang yang dipimpin oleh raja Sanjaya.

Pada abad ke XVI kerajaan Majapahit Hindu runtuh, lalu berdirilah kerajaan Islam pertama yang berada di Demak dengan raja pertama yaitu raden Patah yang merupakan salah satu keturunan dari raja Majapahit yang terakhir. Pada tahun 1568 kerajaan Demak berakhir dengan ditandainya perpindahan kota raja yang semula di Demak dipindah ke Pajang oleh Joko Tingkir (menantu sultan Trenggono sultan terakhir kerajaan Demak). Kemudian Joko Tingkir mendirikan kerajaan Pajang dan mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang raja dengan gelar Sultan Adiwijaya. Pada masa pemerintahannya telah terjadi satu pemberontakan besar yang dipimpin oleh Arya Penangsang namun bisa ditumpas oleh Ki Ageng Pemanahan, atas jasanya itu Sultan Adiwijaya memberi hadiah berupa tanah Mataram. Pada tahun 1588 putra dari Ki Ageng Pemanahan yaitu Danang Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram Islam pertama di Jawa Tengah dengan pemimpin yang tidak lain adalah dirinya sendiri dengan gelar Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam ini tidak pernah sepi dari konflik internal. VOC yang saat itu sudah mempunyai kekuasaan di beberapa daerah di pulau Jawa memihak salah satu pihak yang sedang bertikai. Puncaknya pada tahun 1755 dibuatlah perjanjian Giyanti yang membagi wilayah

kerajaan Mataram menjadi dua bagian yaitu Kasunanan Surakarta dibawah kekuasaan Sunan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta dibawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pada tahun 1830 setelah berakhirnya perang Diponegoro seluruh Jawa Tengah jatuh dibawah kekuasaan Belanda.

Sampai pada tahun 1905 Jawa Tengah terbagi menjadi 5 (lima) wilayah karisidenan (*gewesten*) yang terdiri dari Semarang, Pati, Kedu, Pekalongan dan Banyumas. Sementara Surakarta masih menjadi daerah swapraja kerajaan (*vorstenland*) yang berdiri sendiri dan mempunyai dua wilayah yaitu kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran seperti halnya Yogyakarta. Pada masing-masing *gewest* terdiri atas beberapa kabupaten (*Regentschap*). Saat itu *regenstschap* Tuban dan Bojonegoro masuk pada wilayah Pati *gewest*. Setelah diberlakukannya *Decentralisatie Besluit* pada tahun 1905, *gewesten* diberi otonomi daerah dan dibentuk dewan daerah, selain itu dibentuk juga *Standgeemente* (kotapraja) yang otonom, antarlain Pekalongan, Tegal, Magelang, Salatiga dan Semarang.

Sejak tahun 1930, ditetapkan provinsi sebagai daerah otonom yang memiliki *Provinciale Raad* (dewan provinsi) meliputi beberapa *gewesten* (karisidenan) yang dibagi beberapa *Regentschap* (kabupaten) serta dibagi lagi dalam beberapa *district* (kawedanan). Provinsi Jawa Tengah sendiri mempunyai lima karesidenan yaitu karesidenan Pati, Pekalongan, Semarang, Kedu dan Banyumas.

Setelah Indonesia Merdeka pada tahun 1945, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk departemen-departemen dan pemerintahan provinsi, dan salah satu provinsi yang pertama kali dibentuk adalah Jawa Tengah wilayahnya meliputi karesidenan Semarang, karesidenan Pekalongan, karesidenan Rembang, karesidenan Banyumas, dan karesidenan Kedu. Pada tahun 1946 pemerintah Indonesia membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran menjadi satu karesidenan, yaitu karesidenan Istimewa Surakarta dan termasuk menjadi bagian wilayah provinsi Jawa Tengah. Pada tahun

1950 melalui undang-undang nomor 10 tahun 1950 ditetapkannya pembentukan kabupaten dan kota madya di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota madya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004, bahwa pada tanggal 15 agustus tahun 1950 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.<sup>1</sup>

#### **b. Kondisi Geografi**

Jawa Tengah secara geografi, astronomi dan geologi merupakan provinsi yang strategis di pulau Jawa. Secara geografi Jawa Tengah diapit oleh tiga provinsi, laut dan samudera. Batas yang mengapitnya yaitu sebelah timur ada Provinsi Jawa Timur, sebelah utara ada Laut Jawa, sebelah barat ada Provinsi Jawa Barat dan sebelah selatan ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia. Luas Provinsi Jawa Tengah yaitu 32.544,12 km<sup>2</sup> atau lebih dari seperempat luas wilayah Pulau Jawa.

Secara astronomis, Jawa Tengah terletak pada 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan anantara 108°30' - 111°30' Bujur Timur (termasuk pulau Karimunjawa), jarak terjauh dari barat ketimur adalah 263 km dan dari utara ke selatan sejauh 226 km (tidak termasuk pulau Karimunjawa), seperti pada umumnya wilayah di Indonesia, secara geologi Jawa Tengah berada pada jalur pegunungan muda dunia sehingga banyak gunung berapi aktif. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten, dan 6 kota yang membawahi 576 kecamatan. Pada tingkatan yang lebih rendah, terdapat 7.809 desa dan 753 kelurahan. Banyaknya jumlah kelurahan/desa menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,28 juta hektar atau 25,04 persen dari luas pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia.

Menurut stasiun klimatologi kelas I Semarang, rata-rata suhu di Jawa Tengah pada tahun 2020 sekitar 24,2°C sampai dengan 28,3°C. Untuk daerah di pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Sedangkan untuk kelembaban udara bervariasi, mulai dari 78% hingga

---

<sup>1</sup> Moh. Farukhi, *Mengenal 34 Provinsi Indonesia Jawa Tengah* (Surakarta: Sinergi Prima Magna, 2018). 30-31

85%. Untuk curah hujan paling tinggi tercatat di SMPK Sempor Kebumen sebesar 4,479 mm<sup>3</sup> dan hari hujan terbanyak tercatat di stasiun Meteorologi Cilacap yang sebanyak 210 hari.<sup>2</sup>

### c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan data sensus penduduk 2020 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 yakni jumlah sebanyak 18.362.143 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 18.153.892 jiwa penduduk perempuan dengan total sebanyak 36.516.035 dan rasio jenis kelamin sebanyak 101,15 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan berbanding 101 penduduk laki-laki. Berdasarkan jumlah tersebut Jawa Tengah dinyatakan sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga sesudah Jawa Barat dan Jawa Timur di Indonesia.

Kepadatan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak 1.113,27 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk tertinggi berada pada wilayah kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.353,27 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah pada wilayah kabupaten Blora sebesar 490,05 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Adapun rasio ketergantungan pada tahun 2020 tercatat bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun dan diatas 65 tahun.<sup>4</sup>

## 2. Deskripsi Data Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemiskinan (Y), sedangkan variabel independennya adalah Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>1</sub>), Pengangguran (X<sub>2</sub>), dan Indeks Pembangunan Manusia (X<sub>3</sub>). Adapun statistik deskriptif yang akan dibahas meliputi: jumlah data (N), nilai rata-rata (mean), standar deviasi ( $\delta$ ), nilai maksimum, dan nilai

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah 2017*, No. 33550.1706 (2017), 3-4.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah*, BPS Sensus Penduduk (SP) 2010.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Jawa Tengah," *Kementerian Dalam Negeri*, no. 07 (2021): 1-11, <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1297/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-jawa-tengah.html>.

minimum untuk masing-masing dari variabel terlihat seperti pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Analisis Deskriptif**

Variabel	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	175	4.056914	-	23.54000	3.447754
Pengangguran	175	4.943771	10.36000	9.830000	1.809645
IPM	175	71.69954	1.500000	83.19000	4.467163
Kemiskinan	175	11.51257	63.98000	3.980000	20.53000
					3.839455

Sumber: Output Eviews 10 data diolah

Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 175 data yang diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2016-2020.

a. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ( $X_1$ )

Pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. PDB/PDRB adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. PDB/PDRB digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional dan sebagai dasar pembuatan perkiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.<sup>5</sup> Berikut ini adalah daftar tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang digunakan sebagai sampel penelitian:

**Tabel 4.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah**

Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Cilacap	5.09	2.58	2.99	2.27	-10.36
Kabupaten Banyumas	6.05	6.34	6.45	6.32	-1.65
Kabupaten Purbalingga	4.85	5.37	5.42	5.65	-1.23

<sup>5</sup> BPS, "Laju Pertumbuhan Ekonomi PDB/PDRB," Sirusa Badan Pusat Statistik, 2021.

Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Banjarnegara	5.44	5.65	5.67	5.60	-1.32
Kabupaten Kebumen	5.01	5.15	5.53	5.52	-1.46
Kabupaten Purworejo	5.15	5.27	5.33	5.44	-1.66
Kabupaten Wonosobo	5.36	4.14	5.06	5.61	-1.66
Kabupaten Magelang	5.39	5.50	5.28	5.30	-1.68
Kabupaten Boyolali	5.33	5.80	5.72	5.96	-1.24
Kabupaten Klaten	5.17	5.34	5.47	5.50	-1.18
Kabupaten Sukoharjo	5.72	5.76	5.79	5.92	-1.70
Kabupaten Wonogiri	5.25	5.32	5.41	5.14	-1.41
Kabupaten Karanganyar	5.40	5.77	5.98	5.93	-1.87
Kabupaten Sragen	5.77	5.97	5.75	5.90	-1.81
Kabupaten Grobogan	4.51	5.85	5.83	5.37	-1.59
Kabupaten Blora	23.54	5.98	4.38	4.05	-4.66
Kabupaten Rembang	5.28	6.98	5.89	5.20	-1.49
Kabupaten Pati	5.49	5.67	5.71	5.86	-1.15
Kabupaten Kudus	2.54	3.21	3.24	3.10	-3.53
Kabupaten Jepara	5.06	5.39	5.85	6.02	-1.94
Kabupaten Demak	5.09	5.82	5.40	5.36	-0.23
Kabupaten Semarang	5.30	5.65	5.67	5.39	-2.67
Kabupaten Temanggung	5.02	5.03	5.13	5.05	-2.13
Kabupaten Kendal	5.56	5.78	5.77	5.71	-1.53
Kabupaten Batang	5.03	5.55	5.72	5.39	-1.29
Kabupaten Pekalongan	5.19	5.44	5.76	5.35	-1.89
Kabupaten Pemalang	5.43	5.61	5.69	5.80	-0.66
Kabupaten Tegal	5.92	5.38	5.51	5.58	-1.46
Kabupaten Brebes	5.11	5.65	5.26	5.72	-0.59
Kota Magelang	5.23	5.42	5.46	5.44	-2.45
Kota Surakarta	5.35	5.70	5.75	5.78	-1.74
Kota Salatiga	5.27	5.58	5.84	5.90	-1.68
Kota Semarang	5.89	6.70	6.48	6.81	-1.61
Kota Pekalongan	5.36	5.32	5.69	5.50	-1.87
Kota Tegal	5.49	5.95	5.87	5.77	-2.25

Sumber: Data Publikasi BPS Jawa Tengah (diolah)

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi terendah adalah kabupaten Cilacap pada tahun 2020 yaitu sebesar -10,36%. Sedangkan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah kabupaten Blora pada tahun 2016 yaitu sebesar 23,54%.

Adapun jumlah keseluruhan angka pada data dibagi dengan banyaknya data atau mean adalah 4,06%.

b. Pengangguran ( $X_2$ )

Menurut Iskandar Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam golongan angkatan kerja dan secara aktif sedang mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, namun belum bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Orang yang tidak bekerja dan tidak secara aktif mencari pekerjaan maka orang tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai penganggur.<sup>6</sup> Berikut ini adalah daftar tingkat pengangguran di Jawa Tengah yang digunakan sebagai sampel penelitian:

**Tabel 4.3**  
**Pengangguran di Jawa Tengah**

Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Tengah	4.99	4.57	4.47	4.44	6.48
Kabupaten Cilacap	8.01	6.30	7.49	7.24	9.10
Kabupaten Banyumas	6.37	4.62	4.15	4.17	6.00
Kabupaten Purbalingga	4.84	5.33	6.02	4.73	6.10
Kabupaten Banjarnegara	5.05	4.72	3.99	4.44	5.86
Kabupaten Kebumen	4.14	5.58	5.48	4.69	6.07
Kabupaten Purworejo	4.01	3.64	4.43	2.91	4.04
Kabupaten Wonosobo	4.47	4.18	3.50	3.43	5.37
Kabupaten Magelang	5.16	2.44	2.89	3.07	4.27
Kabupaten Boyolali	2.03	3.67	2.18	3.09	5.28
Kabupaten Klaten	2.51	4.35	3.14	3.54	5.46
Kabupaten Sukoharjo	4.52	2.27	2.72	3.39	6.93
Kabupaten Wonogiri	3.07	2.38	2.28	2.55	4.27
Kabupaten Karanganyar	3.60	3.17	2.28	3.12	5.96
Kabupaten Sragen	4.51	4.55	4.83	3.32	4.75
Kabupaten Grobogan	5.22	3.02	2.22	3.54	4.50
Kabupaten Blora	4.68	2.85	3.30	3.82	4.89
Kabupaten Rembang	4.51	3.19	2.83	3.60	4.83
Kabupaten Pati	4.43	3.83	3.57	3.64	4.74
Kabupaten Kudus	5.04	3.56	3.28	3.80	5.53
Kabupaten Jepara	3.12	4.84	3.75	2.92	6.70
Kabupaten Demak	6.02	4.47	7.03	5.42	7.31
Kabupaten Semarang	2.57	1.78	2.25	2.54	4.57

<sup>6</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 264.

Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Temanggung	1.50	2.97	3.23	2.98	3.85
Kabupaten Kendal	7.07	4.93	6.02	6.26	7.56
Kabupaten Batang	4.56	5.82	4.20	4.11	6.92
Kabupaten Pekalongan	5.10	4.39	4.36	4.35	6.97
Kabupaten Pemasang	6.53	5.59	6.17	6.45	7.64
Kabupaten Tegal	9.52	7.33	8.24	8.12	9.82
Kabupaten Brebes	6.49	8.04	7.20	7.39	9.83
Kota Magelang	6.43	6.68	4.78	4.37	8.59
Kota Surakarta	4.53	4.47	4.35	4.16	7.92
Kota Salatiga	6.43	3.96	4.23	4.33	7.44
Kota Semarang	5.77	6.61	5.21	4.50	9.57
Kota Pekalongan	4.10	5.05	6.08	5.80	7.02
Kota Tegal	8.06	8.19	7.81	8.08	8.40

Sumber: Data Publikasi BPS Jawa Tengah (diolah)

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 yang memiliki tingkat pengangguran terendah adalah kabupaten Temanggung pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,5%. Sedangkan yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi adalah kabupaten Brebes pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,83%. Adapun jumlah keseluruhan angka pada data dibagi dengan banyaknya data atau mean adalah 4,94%.

c. Indeks Pembangunan Manusia ( $X_3$ )

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indikator dalam mengukur kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah alat ukur yang digunakan untuk mengamati pencapaian pembangunan manusia yang mencakup komponen dasar kualitas hidup meliputi angka harapan hidup yang menggambarkan indeks kesehatan harapan lama sekolah yang menggambarkan indeks pendidikan serta kemampuan daya beli masyarakat yang menggambarkan standar hidup layak. Berikut ini adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah yang digunakan sebagai sampel penelitian:

**Tabel 4.4**  
**IPM di Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Tengah	69.98	70.52	71.12	71.73	71.87
Kabupaten Cilacap	68.60	68.90	69.56	69.98	69.95
Kabupaten Banyumas	70.49	70.75	71.30	71.96	71.98
Kabupaten Purbalingga	67.48	67.72	68.41	68.99	68.97
Kabupaten Banjarnegara	65.52	65.86	66.54	67.34	67.45
Kabupaten Kebumen	67.41	68.29	68.80	69.60	69.81
Kabupaten Purworejo	70.66	71.31	71.87	72.50	72.68
Kabupaten Wonosobo	66.19	66.89	67.81	68.27	68.22
Kabupaten Magelang	67.85	68.39	69.11	69.87	69.87
Kabupaten Boyolali	72.18	72.64	73.22	73.80	74.25
Kabupaten Klaten	73.97	74.25	74.79	75.29	75.56
Kabupaten Sukoharjo	75.06	75.56	76.07	76.84	76.98
Kabupaten Wonogiri	68.23	68.66	69.37	69.98	70.25
Kabupaten Karanganyar	74.90	75.22	75.54	75.89	75.86
Kabupaten Sragen	71.43	72.40	72.96	73.43	73.95
Kabupaten Grobogan	68.52	68.87	69.32	69.86	69.87
Kabupaten Blora	66.61	67.52	67.95	68.65	68.84
Kabupaten Rembang	68.60	68.95	69.46	70.15	70.02
Kabupaten Pati	69.03	70.12	70.71	71.35	71.77
Kabupaten Kudus	72.94	73.84	74.58	74.94	75.00
Kabupaten Jepara	70.25	70.79	71.38	71.88	71.99
Kabupaten Demak	70.10	70.41	71.26	71.87	72.22
Kabupaten Semarang	72.40	73.20	73.61	74.14	74.10
Kabupaten Temanggung	67.60	68.34	68.83	69.56	69.57
Kabupaten Kendal	70.11	70.62	71.28	71.97	72.29
Kabupaten Batang	66.38	67.35	67.86	68.42	68.65
Kabupaten Pekalongan	67.71	68.40	68.97	69.71	69.63
Kabupaten Pemasang	64.17	65.04	65.67	66.32	66.32
Kabupaten Tegal	65.84	66.44	67.33	68.24	68.39
Kabupaten Brebes	63.98	64.86	65.68	66.12	66.11
Kota Magelang	77.16	77.84	78.31	78.80	78.99
Kota Surakarta	80.76	80.85	81.46	81.86	82.21
Kota Salatiga	81.14	81.68	82.41	83.12	83.14
Kota Semarang	81.19	82.01	82.72	83.19	83.05
Kota Pekalongan	73.32	73.77	74.24	74.77	74.98
Kota Tegal	73.55	73.95	74.44	74.93	75.07

Sumber: Data Publikasi BPS Jawa Tengah (diolah)

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 Indeks Pembangunan Manusia terendah adalah kabupaten Brebes pada tahun 2016 yaitu sebesar 63,98%. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia paling tinggi adalah kota Semarang pada tahun 2019 yaitu sebesar 83,19%. Adapun jumlah keseluruhan angka pada data dibagi dengan banyaknya data atau mean adalah 71,7%.

d. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau golongan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak, meliputi sandang, pangan dan papan.<sup>7</sup> Kemiskinan yang terjadi seringkali menimbulkan berbagai macam masalah, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, serta menghambat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah yang terkena imbas dari permasalahan kemiskinan tersebut dikarenakan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.<sup>8</sup>

Berikut merupakan data tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun, yaitu:

**Tabel 4. 5**  
**Kemiskinan di Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Tengah	13.27	13.01	11.32	10.80	11.41
Kabupaten Cilacap	14.12	13.94	11.25	10.73	11.46
Kabupaten Banyumas	17.23	17.05	13.50	12.53	13.26
Kabupaten Purbalingga	18.98	18.80	15.62	15.03	15.90
Kabupaten Banjarnegara	17.46	17.21	15.46	14.76	15.64
Kabupaten Kebumen	19.86	19.60	17.47	16.82	17.59
Kabupaten Purworejo	13.91	13.81	11.67	11.45	11.78

<sup>7</sup> BPS, “Kemiskinan dan Ketimpangan,” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021, <https://jateng.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab4>.

<sup>8</sup> Dwi Puspa Hambarsari dan Kunto Inggit, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014,” *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1, no. 2 (2016): 257.

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Wonosobo	20.53	20.32	17.58	16.63	17.36
Kabupaten Magelang	12.67	12.42	11.23	10.67	11.27
Kabupaten Boyolali	12.09	11.96	10.04	9.53	10.18
Kabupaten Klaten	14.46	14.15	12.96	12.28	12.89
Kabupaten Sukoharjo	9.07	8.75	7.41	7.14	7.68
Kabupaten Wonogiri	13.12	12.90	10.75	10.25	10.86
Kabupaten Karanganyar	12.49	12.28	10.01	9.55	10.28
Kabupaten Sragen	14.38	14.02	13.12	12.79	13.38
Kabupaten Grobogan	13.57	13.27	12.31	11.77	12.46
Kabupaten Blora	13.33	13.04	11.90	11.32	11.96
Kabupaten Rembang	18.54	18.35	15.41	14.95	15.60
Kabupaten Pati	11.65	11.38	9.90	9.46	10.08
Kabupaten Kudus	7.65	7.59	6.98	6.68	7.31
Kabupaten Jepara	8.35	8.12	7.00	6.66	7.17
Kabupaten Demak	14.10	13.41	12.54	11.86	12.54
Kabupaten Semarang	7.99	7.78	7.29	7.04	7.51
Kabupaten Temanggung	11.60	11.46	9.87	9.42	9.96
Kabupaten Kendal	11.37	11.10	9.84	9.41	9.99
Kabupaten Batang	11.04	10.80	8.69	8.35	9.13
Kabupaten Pekalongan	12.90	12.61	10.06	9.71	10.19
Kabupaten Pemalang	17.58	17.37	16.04	15.41	16.02
Kabupaten Tegal	10.10	9.90	7.94	7.64	8.14
Kabupaten Brebes	19.47	19.14	17.17	16.22	17.03
Kota Magelang	8.79	8.75	7.87	7.46	7.58
Kota Surakarta	10.88	10.65	9.08	8.70	9.03
Kota Salatiga	5.24	5.07	4.84	4.76	4.94
Kota Semarang	4.85	4.62	4.14	3.98	4.34
Kota Pekalongan	7.92	7.47	6.75	6.60	7.17
Kota Tegal	8.20	8.11	7.81	7.47	7.80

Sumber: Data Publikasi BPS Jawa Tengah (diolah)

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 tingkat kemiskinan terendah adalah kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 3,98%. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan tertinggi ada di kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebesar 20,53%. %. Adapun jumlah keseluruhan angka pada data dibagi dengan banyaknya data atau mean adalah 11,5%.

## B. Analisis Data Penelitian

Analisis data digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Data panel yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan bantuan *software eviews10* untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif untuk melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah dengan kuadrat terkecil atau sering disebut dengan *Ordinary Least Square* (OLS) serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

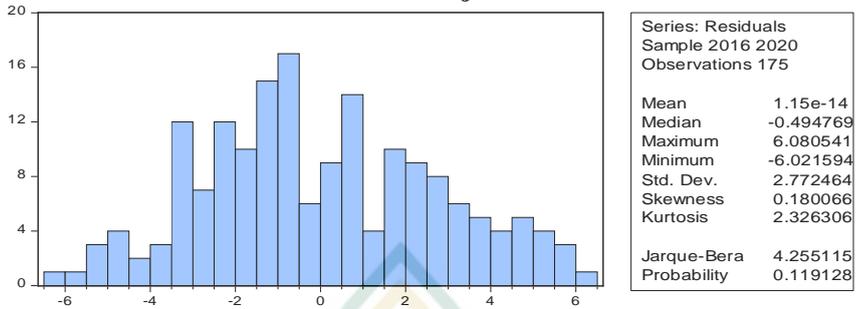
### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji *Jarque-Bera (J-B)*. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan  $\alpha = 0,05$ . Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah :

- 1) Jika nilai signifikan  $> 0.05$  maka distribusi normal
- 2) Jika nilai signifikan  $< 0.05$  maka distribusi tidak normal

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Output Eviews 10 data diolah

Berdasarkan gambar hasil olahan data menggunakan program Eviews 10, diperoleh hasil bahwa nilai *Jb* (*Jarque Bera*) sebesar 4,255115 dan nilai Probabilitas sebesar 0,119128 dimana  $> 0,05$ , yang berarti dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolienaritas antar variabel bebas:

- 1) Jika centered VIF  $> 10$  maka terdapat masalah multikolinearitas
- 2) Jika centered VIF  $< 10$  maka tidak terdapat masalah multikolinearitas

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors			
Date: 11/29/21 Time: 23:52			
Sample: 2016 2020			
Included observations: 175			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PERTUMBUHAN_EKONOM			
I	0.004381	2.771941	1.158576
PENGANGGURAN	0.015793	9.786789	1.150551
IPM	0.002272	262.3516	1.008678
C	12.64513	282.9282	NA

Sumber: Output Eviews 10 data diolah

Berdasarkan hasil output tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai Centered VIF lebih kecil dari 10 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar  $1,158576 < 10$ , pengangguran sebesar  $1,150551 < 10$ , dan IPM sebesar  $1,008678 < 10$  ini berarti dapat diambil kesimpulan bahwa model tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson Test* (DW Test). Suatu data dapat dikatakan terbebas dari masalah autokorelasi apabila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.614643	Mean dependent var	1.15E-14
Adjusted R-squared	0.603242	S.D. dependent var	2.772464
S.E. of regression	1.746341	Akaike info criterion	3.986607
Sum squared resid	515.4005	Schwarz criterion	4.095114
Log likelihood	-342.8281	Hannan-Quinn criter.	4.030620
F-statistic	53.91079	Durbin-Watson stat	2.062592
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10 data diolah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai DW 2,0626, DL 1,7180 dan DU 1,7877. Dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi jika  $DL < DW < 4-DU$ , maka  $1,7180 < 2.0626 < 4 - 1.7877$ . Hasilnya  $1.7180 < 2.0626 < 2.2123$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser.

Hipotesis:

H0 : tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi

H1 : terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi

Keputusan yang diambil ialah jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 (alpha), maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 (alpha), maka H0 ditolak.

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser				
F-statistic	4.576573	Prob. F(3,171)		0.4136
Obs*R-squared	13.00657	Prob. Chi-Square(3)		0.4622
Scaled explained SS	10.72790	Prob. Chi-Square(3)		0.0133
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 11/29/21 Time: 23:40				
Sample: 2016 2020				
Included observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.649521	1.894824	4.564815	0.0000
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.016036	0.035270	0.454677	0.6499
PENGANGGURAN	0.030448	0.066963	0.454700	0.6499
IPM	-0.091539	0.025399	-3.603999	0.0004
R-squared	0.074323	Mean dependent var		2.301829
Adjusted R-squared	0.058083	S.D. dependent var		1.535478
S.E. of regression	1.490218	Akaike info criterion		3.658314
Sum squared resid	379.7481	Schwarz criterion		3.730652
Log likelihood	-316.1024	Hannan-Quinn criter.		3.687656
F-statistic	4.576573	Durbin-Watson stat		0.849612
Prob(F-statistic)	0.004136			

Sumber: Output Eviews 10 data diolah

Berdasarkan output di atas, nilai f hitung sebesar 4,577 dan nilai *Obs\*R Squared* sebesar 0,074 nilai tersebut lebih kecil dari f tabel sebesar 2,66. Untuk nilai

*probability f* sebesar 0,4136 dan *probability Obs\*R Squared* sebesar 0,4622 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan model diatas tidak terdapat heterokedastisitas.

**2. Analisis Regresi Data Panel**

Penelitian ini data menggunakan data panel yaitu penggabungan data *time series* dengan data *cross section*, untuk memenuhi regresi data panel yang sesuai penelitian harus melakukan pilihan model yang baik. Adapun. Adapun metode estimasi regresi data panel bisa dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Berikut ini hasil dari pendekatan tersebut:

- a. Common Effect Model (CEM)

**Tabel 4. 9**  
**Model Regresi *Common Effect***

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/30/21 Time: 00:32				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pertumbuhan_Ekonomi	0.014716	0.066190	0.222334	0.8243
Pengangguran	-0.049861	0.125669	-0.396762	0.6920
IPM	-0.593195	0.047666	-12.44471	0.0000
C	54.23118	3.555999	15.25062	0.0000
R-squared	0.478574	Mean dependent var		11.51257
Adjusted R-squared	0.469426	S.D. dependent var		3.839455
S.E. of regression	2.796678	Akaike info criterion		4.917334
Sum squared resid	1337.461	Schwarz criterion		4.989672
Log likelihood	-426.2667	Hannan-Quinn criter.		4.946676
F-statistic	52.31559	Durbin-Watson stat		0.101667
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 10 data diolah

b. Fixed Effect Model (FEM)

**Tabel 4. 10**  
**Model Regresi *Fixed Effect***

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/30/21 Time: 00:34				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PERTUMBUHAN_EKONOM				
I	-0.057718	0.021214	-2.720691	0.0074
PENGANGGURAN	0.080149	0.061670	1.299638	0.1959
IPM	-1.275050	0.077766	-16.39605	0.0000
C	102.7710	5.668047	18.13164	0.0000
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.978137	Mean dependent var	11.51257	
Adjusted R-squared	0.972233	S.D. dependent var	3.839455	
S.E. of regression	0.639790	Akaike info criterion	2.134128	
Sum squared resid	56.07843	Schwarz criterion	2.821339	
Log likelihood	-148.7362	Hannan-Quinn criter.	2.412880	
F-statistic	165.6575	Durbin-Watson stat	1.597463	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 10 data diolah

c. Random Effect Model (REM)

**Tabel 4. 11**  
**Model Regresi *Random Effect***

Dependent Variable: KEMISKINAN			
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)			
Date: 11/30/21 Time: 00:36			
Sample: 2016 2020			
Periods included: 5			

Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PERTUMBUHAN_EKONOMI	-0.027369	0.020200	-1.354890	0.1772
PENGANGGURAN	0.094707	0.060427	1.567292	0.1189
IPM	-1.039100	0.063220	-16.43633	0.0000
C	85.65836	4.636474	18.47489	0.0000
	Effects Specification			
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.805930	0.9506
Idiosyncratic random			0.639790	0.0494
	Weighted Statistics			
R-squared	0.611335	Mean dependent var		1.167890
Adjusted R-squared	0.604516	S.D. dependent var		1.089299
S.E. of regression	0.685033	Sum squared resid		80.24521
F-statistic	89.65568	Durbin-Watson stat		1.160633
Prob(F-statistic)	0.000000			
	Unweighted Statistics			
R-squared	0.204238	Mean dependent var		11.51257
Sum squared resid	2041.135	Durbin-Watson stat		0.045629

Sumber: Output Eviews 10 data diolah

d. Uji Chow

Uji pertama yang dilakukan adalah uji chow untuk memilih model mana yang paling baik antara *common effect* dan *fixed effect*, dengan asumsi sebagai berikut:

$H_0$  : Model CEM yang paling tepat

$H_1$  : Model FEM yang paling tepat

Jika nilai *probabilitas cross-section chi square* < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ . Jika nilai *probabilitas cross-section chi square* > 0,05  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$ . Berikut merupakan hasil dari uji chow:

**Tabel 4. 12**  
**Hasil Uji *Chow Test***

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	92.071380	(34,137)	0.0000	
Cross-section Chi-square	555.061001	34	0.0000	

Sumber: Output Eviews 10 data diolah

Hasil pengujian menunjukkan nilai *probabilitas cross-section chi square* sebesar  $0,0000 < 0,05$  yang berarti dalam penelitian ini model penelitian yang akan digunakan adalah model penelitian *fixed effect*.

e. Uji Hausman

Uji yang selanjutnya yaitu uji hausman yang bertujuan untuk menentukan model FEM atau REM yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel, dengan asumsi sebagai berikut:

$H_0$  : Model REM yang paling tepat

$H_1$  : Model FEM yang paling tepat

Jika nilai *probabilitas cross-section random*  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ . Jika nilai *probabilitas cross-section random*  $> 0,05$   $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$ . Berikut hasil uji Hausman:

**Tabel 4. 13**  
**Hasil uji *Hausman***

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	28.039608	3	0.0000	

Sumber: Output Eviews 10 data diolah

Berdasarkan tabel tersebut hasil uji Hausman menggunakan evIEWS 10 diperoleh hasil nilai probabilitas *cross section random* sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,0000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak. Sehingga estimasi model data panel yang tepat yaitu model *fixed effect*. Maka tidak diperlukan uji LM (*Langrange Multiplier*).

**3. Uji parsial (uji t)**

Uji t dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana secara parsial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, serta untuk mengetahui signifikan atau tidak variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Adapun hasil dari tingkat signifikansi bisa diketahui dari  $t_{hitung}$  yang dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  yang bisa dicari dengan menggunakan derajat kebebasan  $df = n-k-1$  (dimana  $n$  adalah jumlah sampel, dan  $k$  adalah jumlah variabel independen), sehingga nilai  $df = 175-3-1$  diperoleh nilai  $df = 171$  dengan signifikansi 5% (uji dua arah:  $0,05 / 2 = 0,025$ ), berdasarkan ketentuan tersebut maka diketahui nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,974.

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Uji Parsial t**

Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PERTUMBUHAN_EKONOMI	-0.057718	0.021214	-2.720691	0.0074
PENGANGGURAN	0.080149	0.061670	1.299638	0.1959
IPM	-1.275050	0.077766	-16.39605	0.0000
C	102.7710	5.668047	18.13164	0.0000
	Effects Specification			

Sumber: Output EvIEWS 10 data diolah

Berdasarkan tabel 4.14, maka dapat dilakukan analisis uji t sebagai berikut:

- a. Pengaruh pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) terhadap kemiskinan (Y)

Nilai t-statistik variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh sebesar -2,721. Tanda negatif (-) yang terdapat

pada nilai  $t_{\text{statistik}}$  memiliki arti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan nilai  $p\text{-value}$  sebesar  $0,0074 < 0,05$  yang artinya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, bisa dinyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

b. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan

Nilai  $t\text{-statistik}$  variabel pengangguran diperoleh sebesar 1,299 dengan nilai  $p\text{-value}$  sebesar  $0,196 > 0,05$ . Sehingga bisa dinyatakan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap variabel kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

c. Pengaruh IPM terhadap kemiskinan

Nilai  $t\text{-statistik}$  variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah -16,396. Tanda negatif (-) yang terdapat pada nilai  $t_{\text{statistik}}$  memiliki arti bahwa variabel IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan  $p\text{-value}$  sebesar  $0.0000 < 0,05$  yang artinya variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, bisa dinyatakan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

4. Uji F

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pada derajat kebebasan  $f_{\text{tabel}} = n-k (175-3) = 172$  dengan signifikansi 5% yaitu 2,66.

**Tabel 4. 15**  
**Hasil Uji Simultan F**

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.978137	Mean dependent var	11.51257
Adjusted R-squared	0.972233	S.D. dependent var	3.839455
S.E. of regression	0.639790	Akaike info criterion	2.134128
Sum squared resid	56.07843	Schwarz criterion	2.821339
Log likelihood	-148.7362	Hannan-Quinn criter.	2.412880
F-statistic	165.6575	Durbin-Watson stat	1.597463
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10 data diolah

Dari tabel 4.15 maka bisa diketahui bahwa nilai probability (F-statistik) sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka bisa dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak atau secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan.

### 5. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi yaitu menunjukkan antara variabel terikat dan variabel bebas sejauh mana tingkat hubungannya/ seberapa bisa kontribusi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Jika angka *adjusted r<sup>2</sup>* semakin mendekati 1 artinya model regresi yang dipakai lebih sesuai dengan model penduga variabel terikat (Y). Dari hasil regresi diperoleh nilai *adjusted r<sup>2</sup>* 0,972233 atau 97,2% menunjukkan bahwa variabel bebas yang dipakai model penelitian ini mempunyai kemampuan menjelaskan variabel terikat sebesar 97,2%. Sedangkan sisanya 2,8% dijelaskan oleh variabel diluar model.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari nilai *p-value* sebesar 0,0074 yang signifikan pada tingkat kesalahan 5% (0,05), dengan nilai koefisien negatif sebesar -2,721. Maka bisa dijelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan variabel kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) pada penelitian ini diterima.

Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan perkapita atau penambahan output suatu negara atau wilayah. Seiring dengan naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat dari periode sebelumnya juga meningkat. Ketika pendapatan masyarakat bertambah maka bisa diperkirakan masyarakat akan terbebas dari kemiskinan. Sehingga jika pertumbuhan ekonomi naik maka tingkat kemiskinan akan turun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terbukti bisa mengurangi angka

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari produktivitas kegiatan perekonomian. Maka dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di setiap tahunnya maka bisa disimpulkan bahwa terdapat adanya peningkatan produktivitas barang dan jasa di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya. Dengan begitu, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan memberi dampak pada proses pertambahan output daerah tersebut.

Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu rata-rata diatas 5% dalam kurun waktu 2016-2019 dan tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, setiap tahunnya terjadi peningkatan PDRB pada masing-masing wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Terkecuali pada tahun 2020 dimana perekonomian Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar -2,65% dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda. Dari sisi produksi, terjadi kontraksi pada 11 lapangan usaha dimana kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar -33,15%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada komponen impor barang maupun jasa yang sebesar -14,82%.<sup>9</sup> Daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah kabupaten Blora pada tahun 2016 yaitu sebesar 23,54% yang ditopang dari sektor pertambangan dan penggalian serta dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.<sup>10</sup> Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada kabupaten Cilacap tahun 2020 sebesar -10,36%. Kontraksi yang terjadi disebabkan karena industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 13,98% menjadi Rp.58,36 Triliun dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 58% menjadi Rp. 67,84 Triliun. Seperti yang diketahui, kontribusi terbesar perekonomian kabupaten Cilacap disumbang dari sektor industri pengolahan. Kontraksi yang terjadi

---

<sup>9</sup> BPS, "Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2020," *Berita Resmi Statistik* (Semarang, 2020), <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1291/ekonomi-jawa-tengah-triwulan-iv-2020-masih-mengalami-kontraksi-sebesar--3-34-persen.html>.

<sup>10</sup> BAPPEDA Kabupaten Blora, *Analisis Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2019* (Blora: BAPPEDA Kabupaten Blora, 2019). 56.

dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk meredam lonjakan kasus covid-19 yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi kabupaten Cilacap tumbuh negatif.<sup>11</sup>

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hambarsari dan Inggit tahun 2016 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.<sup>12</sup> Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Suripto dan Subayil tahun 2020 juga menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta.<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana dkk tahun 2021 juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.<sup>14</sup> Namun terdapat hasil yang berbeda dari penelitian Romi dan Umiyati tahun 2018 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kota Jambi.<sup>15</sup> Disamping itu penelitian Nainggolan tahun 2020 juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan

---

<sup>11</sup> Viva Budy Kusnandar, "Perekonomian Kabupaten Cilacap Mengalami Kontraksi Terdalam di Jawa Tengah," Databoks, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/21/perekonomian-kabupaten-cilacap-mengalami-kontraksi-terdalam-di-jawa-tengah-lebih-dari-10-pada-2020>.

<sup>12</sup> Dwi Puspa Hambarsari dan Kunto Inggit, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1, no. 2 (2016): 278.

<sup>13</sup> Suripto dan Lalu Subayil, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017," *Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 140.

<sup>14</sup> Deby Oktaviana, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun," *Syntax Idea* 3, no. 5 (2021): 1045.

<sup>15</sup> Syahrur Romi dan Etik Umiyati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi," *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 7, no. 1 (2018): 6, file:///C:/Users/Sahabat Sg/Downloads/4439-Article Text-9760-1-10-20180401.pdf.

terhadap kemiskinan.<sup>16</sup> Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

## 2. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa variabel pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari nilai *p-value* sebesar 0,196 yang tidak signifikan pada tingkat kesalahan 5% (0,05) dengan nilai koefisien positif sebesar 1,299. Maka bisa dijelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel pengangguran dengan variabel kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) pada penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hubungan tingkat pengangguran yang tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan membuktikan bahwa orang-orang menganggur belum tentu memiliki penghasilan yang rendah atau mereka yang menganggur masih dibiayai oleh orang yang berpendapatan cukup atau lebih. Selain dari itu, tidak semua para pengangguran sementara selalu miskin. Disisi lain bisa disebabkan karena adanya imigrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kota-kota besar dan kabupaten disekitarnya, ini dikarenakan sesampainya dikota mereka masih belum mendapatkan pekerjaan. Disisi lain, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah paling banyak disumbang dari lulusan SMK, yaitu sebesar 7,50 persen pada tahun 2020.<sup>17</sup> Mereka yang lulusan SMK tidak semuanya benar-benar menganggur. Hal ini adalah pengangguran yang tidak memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Biasanya para lulusan SMK mencari pekerjaan karena baru lulus atau sedang tahap menyiapkan usaha ataupun sudah memiliki pekerjaan tetapi belum aktif bekerja. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu

---

<sup>16</sup> Elisabeth Nainggolan, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019),” *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya (JIMBEP)* 6, no. 2 (2020): 97.

<sup>17</sup> BPS Jawa Tengah, “Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah,” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021.

faktor penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan bisa memberikan pengetahuan tidak hanya yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas tetapi juga bisa sebagai dasar untuk pengembangan diri dan skill atau kemampuan dalam memanfaatkan sarana prasarana yang ada disekitar kita untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan dan peluang untuk mencari pekerjaan dan bekerja juga semakin besar.<sup>18</sup> Penyebab lain dari tingginya jumlah pengangguran dari lulusan SMK adalah karena terjadinya kelebihan penawaran (*supply*) yaitu lulusan SMK dengan jurusan tertentu memiliki jumlah yang berlebih daripada dengan jurusan yang lainnya. Selain itu karena tidak sesuainya jurusan SMK tertentu dengan industri yang sedang membutuhkan diwilayahnya. Serta karena persoalan dimana rata-rata lulusan SMK usinya baru 17 tahun sehingga perlu untuk menunggu satu tahun lagi untuk bisa bekerja.<sup>19</sup> Daerah dengan rata-rata pengangguran tertinggi di Jawa Tengah adalah kabupaten Brebes pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,83%, jumlah ini lebih besar dibanding dengan tahun sebelumnya dimana angka pengangguran di Brebes mencapai 7,39%. Bertambahnya angka pengangguran dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Meskipun demikian faktor lainnya juga berpengaruh seperti musim dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Sedangkan pengangguran tertinggi di Jawa Tengah diurutkan kedua setelah kabupaten Brebes diduduki oleh kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 9,82%, namun angka kemiskinan relatif bagus karena menduduki peringkat ke-10 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Ini karena banyak orang yang menganggur tetapi mereka tidak miskin.

---

<sup>18</sup> Samsul Arifin dan Firmansyah Firmansyah, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten,” *Jurnal Ekonomi-Qu* 7, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.35448/jequ.v7i2.4978>.

<sup>19</sup> Syarief Oebaidillah, “Penyebab Tingginya Pengangguran SMK,” *Media Indonesia*, 2018, <https://mediaindonesia.com/humaniora/160233/ini-penyebab-tingginya-pengangguran-smk>.

<sup>20</sup> Radar Tegal, “Angka Pengangguran Di Brebes Naik Dihantam Pandemi,” *Graha Pena Radar Tegal*, 2021, <https://radartegal.com/dihantam-pandemi-angka-pengangguran-terbuka-di-brebes-naik-244-persen.13917.html>.

Kondisi ini disebabkan dari karakteristik pengangguran di kabupaten Tegal yang masuk kategori pemilih, dengan kata lain mereka memilih pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Disisi lain, banyak para lulusan SMK yang melamar pekerjaan di kota-kota besar seperti Jakarta yang perusahaannya sesuai dengan bekal mereka saat belajar di sekolah.<sup>21</sup>

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kolibu dkk tahun 2017 yang menyatakan bahwa variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara.<sup>22</sup> Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ristika dkk tahun 2021 yang menyatakan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.<sup>23</sup> Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Usman dan Diramita 2018 juga menyatakan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.<sup>24</sup> Namun bertolak belakang dengan penelitian Putra dan Arka tahun 2018 yang menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh dominan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Radar Tegal, “Kabupaten Tegal Peringkat ke 2 Pengangguran Se Jawa Tengah,” Graha Pena Radar Tegal, 2021, <https://radartegal.com/kabupaten-tegal-peringkat-ke-2-angka-pengangguran-se-jateng-namun-kemiskinan-rendah.23119.html>.

<sup>22</sup> Meinny - Kolibu, Vekie Adolf Rumate, dan Daisy S.M. Engka, “Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 8, no. 16 (9 Juli 2017): 12, <https://doi.org/10.35794/jpekd.16456.19.3.2017>.

<sup>23</sup> Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 129–36, <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>.

<sup>24</sup> Diramita dan Umaruddin Usman, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau,” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 01, no. 2017 (2018): 14.

<sup>25</sup> I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali,” *EP Unud* 7, no. 3 (2016): 416–44.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ishak dkk tahun 2020 yang menyatakan bahwa variabel pengangguran mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di kota Makassar.<sup>26</sup>

### 3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji statistik *t* diketahui bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari nilai *p-value* sebesar 0,0000 yang signifikan pada tingkat kesalahan 5% (0,05), dengan nilai koefisien negatif sebesar -16,396. Maka bisa dijelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel Indeks Pembangunan Manusia dengan variabel kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) pada penelitian ini diterima.

Hasil dari hubungan negatif pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diatas menunjukkan bahwa IPM mampu berpengaruh terhadap upaya penurunan tingkat kemiskinan. Selama periode 2016 sampai sekarang IPM terus meningkat dari level sedang menjadi tinggi. Namun adanya pandemi covid-19 menyebabkan sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan Jawa Tengah, dimana IPM Jawa Tengah pada tahun 2020 tumbuh 0,14% lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 IPM Jawa Tengah sebesar 71,73% menjadi 71,87% pada tahun 2020. Naiknya IPM Jawa Tengah disebabkan karena dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan naik, dimana untuk dimensi kesehatan disebabkan karena bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup 0,14 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. sedangkan untuk dimensi pengetahuan disebabkan karena rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah 0,016 tahun lebih lama dan untuk penduduk usia 25 tahun memiliki harapan lama sekolah 0,16 tahun lebih lama dalam menempuh pendidikan. Namun kenaikan dari dua dimensi tersebut belum

---

<sup>26</sup> Robby Achsyansyah Ishak, Junaiddin Zakaria, dan M. Arifin, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar," *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 2 (2020). 51.

mampu diikuti oleh dimensi standar hidup layak. Naiknya IPM Provinsi Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh kenaikan IPM dari kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Hanya 9 kabupaten dan kota yang mengalami penurunan yang disebabkan dari imbas adanya pandemi covid-19.<sup>27</sup> Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Jawa Tengah dipegang oleh kota Semarang tahun 2019 sebesar 83,19%. Predikat menjadi daerah dengan pembangunan manusia terbaik di Jawa Tengah sudah dipegang oleh kota Semarang selama empat tahun berturut-turut. Prestasi yang baik ini dikarenakan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga program yang diinisiasi oleh pemerintah bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal. Karena pembangunan manusia tidak bisa dilakukan secara sepihak saja.<sup>28</sup>

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fadila dan Marwan tahun 2020 yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.<sup>29</sup> Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Kotambunan dkk tahun 2016 yang menunjukkan bahwa variabel IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.<sup>30</sup> Disamping itu penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi dan Miksalmina tahun 2020 menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan

---

<sup>27</sup> Abdul Arif, "Kualitas Manusia Jawa Tengah Beranjak Pelan," AyoSemarang.com, 2020, <https://www.ayosemarang.com/netizen/pr-77800926/Kualitas-Manusia-Jawa-Tengah-Beranjak-Pelan-Semarang-Turun?page=all>.

<sup>28</sup> Beginoto, "Kota Semarang Unggul dalam Pembangunan Manusia," Merdeka News, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kota-semarang-masih-unggul-dalam-pembangunan-manusia-di-2019.html>.

<sup>29</sup> Radiatul Fadila dan Marwan Marwan, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018," *Jurnal Ecogen* 3, no. 1 (2020): 131, <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>.

<sup>30</sup> Lavenia Kotambunan, Sutomo Wim Palar, dan Richard L.H Tumilaar, "Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Diprovinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 01 (2016): 932, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/12078>.

terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.<sup>31</sup> Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitompul tahun 2020 yang menunjukkan bahwa variabel IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kota Medan.<sup>32</sup> Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Palenewen dkk tahun 2018 yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.<sup>33</sup>




---

<sup>31</sup> Miksalmina Heri Tarmizi, “Pengaruh Dana Desa Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Ilmu Mahasiswa (JIM)* 5, no. 4 (2020): 209, [https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=72957](https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=72957).

<sup>32</sup> Boy Sitompul, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan Periode 2010-2019,” *Journal of Trends Economics and Accounting* 1, no. 2 (2020): 73, <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/60>.

<sup>33</sup> Themby O. M. Palenewen, Een N. Walewangko, dan Jacline I. Sumual, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (2018): 60.